



RENCANA KERJA PERUBAHAN

**DINAS KESEHATAN KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**



**PEMERINTAH KABUPATEN TABALONG
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kehadiran Allah SWT Tuhan Yang Maha Kuasa, dengan limpahan taupik dan hidayah-Nya sehingga Rencana Kerja (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 telah diselesaikan.

Sesuai amanat Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Dinas Kesehatan telah menyusun Rencana Kerja (Renja) Dinas Kesehatan tahun 2025.

Renstra Dinas Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif yang memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun dengan mendorong peran aktif masyarakat pada tahun 2025. Rencana Kerja (Renstra) Dinas kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 sebagai pedoman perencanaan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong dalam menyusun program dan

kegiatan dalam Pembangunan Kesehatan selama satu tahun yang berisikan strategi, kebijakan, program dan kegiatan beserta penganggaran untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dokumen rencana Kerja ini diharapkan dapat dijadikan acuan untuk pelaksanaan pembangunan kesehatan di Kabupaten Tabalong baik untuk jajaran kesehatan, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya.

Tanjung, Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabalong



Dr. Husin Ansari, SE, ME

Pembina TK I / IV/b

NIP. 19720418 199303 1 006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Tabalong tahun 2025 - 2026 merupakan dokumen perencanaan 2 (lima) tahun sebagai dasar Pemerintah Kabupaten Tabalong dalam memajukan kesejahteraan rakyat dan menyelenggarakan pelayanan publik daerah.

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 secara garis besar memuat rancangan program dan kegiatan yang direncanakan tahun 2025 serta pendanaan indikatif baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Kesehatan maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja merupakan rancangan usulan sebagai bahan penyusunan rancangan APBD tahun 2025 dengan target yang terukur serta telah disesuaikan berdasarkan prioritas dan strategi utama guna mendukung visi dan misi Dinas Kesehatan. Pengajuan Renja ini telah disusun secara realistis untuk mencapai tujuan pembangunan.

1.2 Landasan Hukum

Dasar Hukum dalam penyusunan Renja SKPD Dinas Kesehatan adalah :

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tabalong;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025;
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
12. Undang - Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan
13. Undang - Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
14. Undang - Undang Nomor Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah DaerahProvinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

17. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2005 - 2025;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 18 Seri D Nomor Seri 13);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 21 Tahun 2011 tentang Tarif Biaya Pelayanan Kesehatan Pada RSUD Tanjung, Puskesmas, Puskesmas Perawatan, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 15 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05);
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2005 - 2025;

25. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 10);

1.3 Maksud dan Tujuan

Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan mengacu pada prioritas program Dinas Kesehatan tahun 2025 yang merupakan Dokumen Perencanaan Urusan Pemerintahan Wajib Kesehatan yang meliputi Organisasi Dinas Kesehatan dan Puskesmas dengan berpedoman Program Indikatif Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Tujuan disusunnya Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan adalah sebagai bahan pedoman penyusunan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 bidang Kesehatan. Rencana Kerja SKPD Dinas Kesehatan ini diharapkan sudah mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan dan Pembangunan (Musrenbang) desa, Kecamatan, Forum SKPD dan Musrenbang Kabupaten. Dinas Kesehatan sudah berusaha mengakomodir usulan Musrenbang desa dan kecamatan, namun sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran yang ada di SKPD Dinas Kesehatan maka tidak semua usulan di Musrenbang kecamatan dapat terakomodir sehingga yang dimasukan merupakan usulan yang super prioritas dari usulan tersebut.

E. Sistematika Penulisan

RANCANGAN RENCANA KERJA (RENJA) SKPD TAHUN 2024

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

(berisi latar belakang kenapa RENJA SKPD disusun, al. Meliputi urgensi/pentingnya SKPD dalam rangka pencapaian target pembangunan daerah (RPJMD) dll.)

B. Dasar Hukum

(berisi peraturan perundangan yang menjadi dasar eksistensi SKPD dan penyusunan Renja SKPD, mulai dari UU, PP, dan Perda).

C. Maksud dan Tujuan

(berisi uraian maksud dan tujuan disusunnya Renja SKPD).

D. Sistematika Penulisan

(berisi urutan Bab dan sub bab penyusunan Renja).

BAB II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Pencapaian Renstra.

B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

C. Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

D. Review terhadap Rencana awal RKPD

E. Perihal Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

B. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

C. Program dan kegiatan

BAB IV Penutup

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun lalu dan Pencapaian Renstra.

Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong tahun 2023 (kegiatan tahun 2024 masih berjalan) tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan 2025-2026.

Hasil pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

PROGRAM	Anggaran	Realisasi	%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	120.346.656.006	92.802.602.462	73,23
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	127.949.545.879	87.336.815.502	65,34
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	9.256.611.020	3.607.699.003	38,57
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	609.517.393	98.441.000	18,92
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	613.699.950	104.911.600	17,44
TOTAL	258.776.303.248	183.950.487.567	67,91

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.1.1 Angka Kematian

Mortalitas adalah angka kematian yang terjadi pada kurun waktu dan tempat tertentu yang diakibatkan oleh keadaan tertentu. Mortalitas atau kejadian kematian dalam suatu masyarakat dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi kesehatan masyarakat, keberhasilan pelayanan kesehatan dan keberhasilan program-program pembangunan kesehatan lainnya. Pada bagian ini kita dapat melihat bagaimana gambaran kejadian kematian dalam periode tahun terakhir di Kabupaten Tabalong.

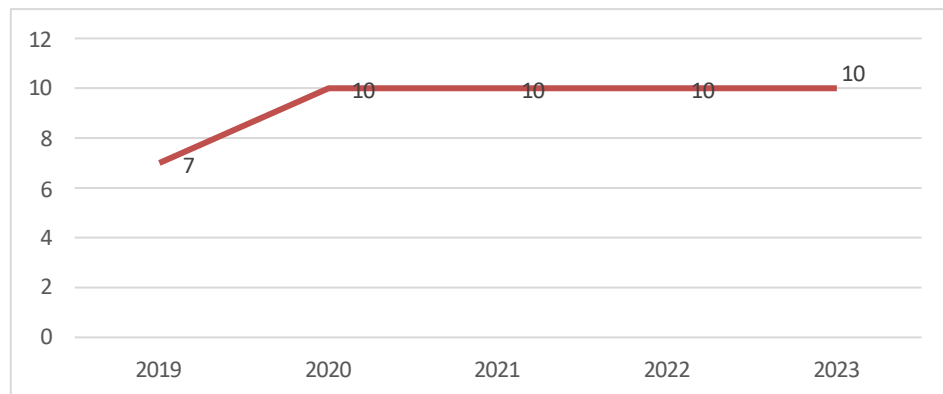
Angka Kematian Bayi (AKB) per-1.000 Kelahiran Hidup.

Infant Mortality Rate atau Angka Kematian Bayi (AKB) merupakan indikator yang lazim digunakan untuk menentukan derajat kesehatan masyarakat sehingga banyak program kesehatan yang ada ditujukan untuk menurunkan AKB ini. AKB ini didefinisikan sebagai jumlah bayi yang meninggal pada fase antara kelahiran hingga bayi belum mencapai umur 1 tahun per 1.000 kelahiran hidup.

Angka kematian bayi diklasifikasikan menjadi empat kelompok yaitu rendah jika AKB kurang dari 20; sedang 20-49, tinggi 50-99 dan sangat tinggi jika AKB di atas 100 per 1000 kelahiran hidup (Depkes, 2009). Berdasarkan klasifikasi tersebut maka AKB di Kabupaten Tabalong termasuk dalam klasifikasi rendah.

Angka kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Tabalong tahun 2023 adalah 10 per 1000 Kelahiran Hidup, jumlah yang sama dengan tahun 2022 yang sebesar 10 per 1000 Kelahiran Hidup. Data selengkapnya dapat di lihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.1
Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup
di Kabupaten Tabalong Tahun 2019 s/d 2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Hasil dari analisis kasus kematian bayi yang ada, lebih dari setengahnya dikarenakan BBLR/Asfeksia, dimana kematiannya di fasilitas kesehatan (Rumah Sakit/Klinik) dan ada juga kasus yang meninggal di rumah dan semuanya telah mendapatkan pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir. Penyebab kelahiran BBLR/prematur di kabupaten Tabalong sebagian besar karena umur kehamilan ibu belum cukup bulan (<37-40 minggu), sebelum masa kehamilan mencapai 37 minggu sudah terjadi persalinan. Hal ini menyebabkan bayi yang dilahirkan memiliki Berat Badan Lahir Rendah (<2500 gram) dan disertai organ tubuh bayi belum cukup matang yang menjadi salah satu faktor resiko tinggi penyebab kematian bayi.

Jumlah Kematian Ibu/Angka Kematian Ibu (AKI)

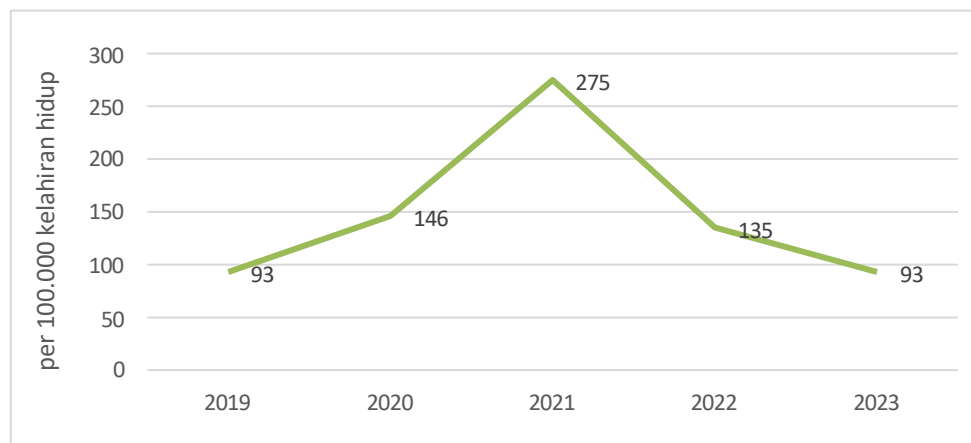
Angka Kematian Ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan)

tanpa memperhitungkan lama kehamilan per 100.000 kelahiran hidup (DepKes 2009). Angka Kematian Ibu secara langsung digunakan untuk memonitor kematian terkait dengan kehamilan. AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan dan pelayanan kesehatan selama kehamilan dan melahirkan.

Jumlah Kematian Ibu di Kabupaten Tabalong pada tahun 2023 sebanyak 3 orang dari 3.243 kelahiran hidup, setara dengan 93 per 100.000 Kelahiran hidup. Angka Kematian Ibu (AKI) tahun 2023 lebih rendah dari tahun 2022 yang sebesar 135 per 100.000 Kelahiran hidup atau dengan jumlah kematian ibu sebanyak 5 orang.

Gambaran angka kematian ibu sejak tahun 2013 sampai tahun 2023 dapat dilihat pada grafik berikut ini.

Grafik 2.2
Angka Kematian Ibu (AKI) di Kabupaten Tabalong Tahun
2019 s/d 2023

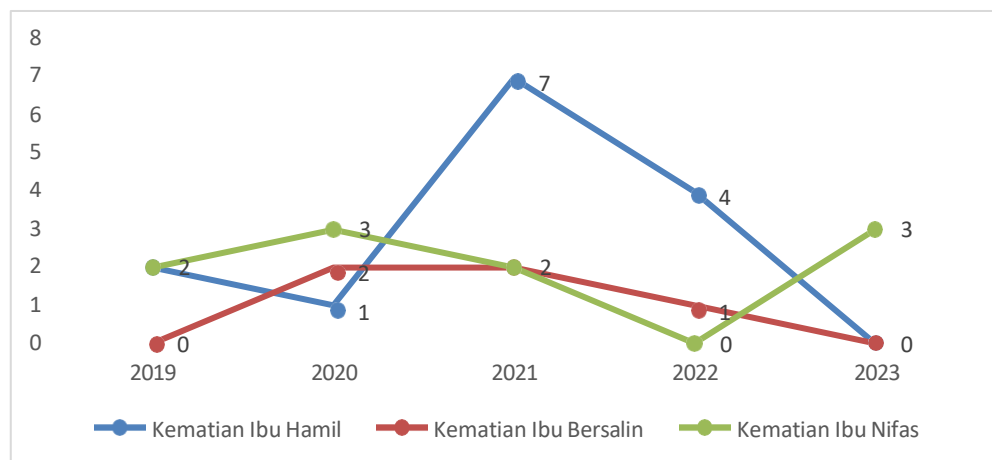


Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2023

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI), di Indonesia sejak tahun 2007 telah dikembangkan

Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K). Untuk mengetahui data kematian ibu per puskesmas dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 2.3
Jumlah Kematian Ibu Hamil, Ibu Melahirkan, dan Ibu Nifas Kabupaten Tabalong Tahun 2019 - 2023



Sumber : Bidang Kesehatan Masyarakat Tahun 2022

Dari kematian ibu di kabupaten Tabalong yang berjumlah 3 kasus semuanya sudah mendapatkan pelayanan ibu hamil sesuai standar kualitas, yaitu pelayanan antenatal yang memenuhi 10T selama kehamilannya. Berdasarkan penyebab kematian ibu yang ada tahun 2023, 2 orang disebabkan Eklamsi, dan sisanya karena gangguan darah.

Dalam upaya percepatan penurunan angka kematian ibu (AKI), di Indonesia sejak tahun 2007 telah dikembangkan Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD

1. Penurunan Angka Kematian Ibu
2. Penurunan Angka Kematian Bayi
3. Penurunan Stunting;
4. *Universal Health Coverage* (UHC) / Jaminan Kesehatan Nasional;
5. Rasio Dokter Terhadap Jumlah Penduduk
6. Fasilitas Kesehatan Dengan Ketersediaan Obat Esensial
7. Nilai AKIP

2.4 Review terhadap Rencana awal RKPD

Analisis lingkungan baik internal maupun eksternal organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan keberhasilan bagi suatu organisasi. Dengan mengetahui kondisi internal maupun eksternal organisasi dengan memperhatikan kebutuhan Renstra Dinas kesehatan kab.Tabalong stakeholders, akan dapat di ketahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang menghadang organisasi.

Analisis lingkungan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan organisasi dalam merespon setiap perkembangan zaman. Lingkungan internal mencakup struktur organisasi, komunikasi antar bagian dalam organisasi, sumberdaya yang semuanya akan mendukung kelangsungan hidup organisasi. Pemahaman terhadap lingkungan internal akan memberikan pemahaman kepada organisasi akan kondisi dan kemampuan organisasi. Sedangkan lingkungan eksternal meliputi situasi dan kondisi di sekeliling organisasi yang berpengaruh pada kehidupan organisasi. Salah satu metode yang dipergunakan untuk melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal adalah metode SWOT.

a. Analisis Eksternal

Berbagai kecenderungan pembangunan terkait dengan sector Kesehatan, berbagai kecenderungan mengkhawatirkan di sector kesehatan antara lain : Ancaman penyakit menular, HIV/AIDS masih ada yang belum terdeteksi dan semakin meningkatnya penyakit tidak menular yang dapat menyebabkan stroke dan penggunaan narkoba menunjukan kenaikan.

Namun disamping itu ada kecenderungan yang positif di sector kesehatan antara lain : semakin meningkatnya perhatian pemerintah terutama untuk masyarakat miskin dan penanggulangan ***masalah sustainable Development Goals*** semakin meningkatnya peran masyarakat dan swasta sehingga meningkatnya mutu pelayanan kesehatan di sertai dengan adanya peningkatan terhadap sarana dan prasarana.

b. Analisis Internal

Analisis internal menggunakan konsep *value chain*, dalam model ini keadaan internal Dinas Kesehatan Kab.tabalong di nilai menggunakan fungsi manajemen dan system pendukung manajerial.

Fungsi manajemen :

Kelemahan : belum mempunyai rencana strategi untuk perencanaan

Kekuatan: mempunyai minat dan motivasi kuat untuk meningkatkan perencanaan dalam rangka menjalankan visi misi dinas kesehatan.

System Pendukung Manajemen

Manajemen SDM :

Kelemahan :Penyebaran SDM yang kurang merata di berbagai UPT Puskesmas dan belum optimalnya pelaksanaan rotasi dan mutasi petugas.

Kekuatan :Kualitas SDM yang bagus; adanya komitmen,loyalitas dan integritas yang tinggi

System Keuangan dalam pelayanan

Kelemahan : system keuangan UPT Puskesmas masih menggunakan pola birokrasi, Tarif perda UPT Puskesmas sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang.

Manajemen Informatika

Kelemahan : Tidak ada kasi khusus menangani SIK dan belum mempunyai system pelaporan online yang baik

Kekuatan : adanya motivasi kuat untuk mengembangkan SIK

BAB IV

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS

TAHUN 2024

A. Tujuan dan Sasaran Target Kinerja SKPD 2024

Sebagaimana tercantum dalam RPD Kabupaten Tabalong 2025 - 2026 maka tujuan pembangunan bidang kesehatan di Kabupaten Tabalong secara umum adalah untuk “Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan di Kabupaten Tabalong”. Adapun sasaran kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatkan pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	Meningkatkan pengelolaan dan kinerja pemerintahan daerah serta kualitas pelayanan publik	Nilai AKIP	BB
Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Meningkatnya akses dan kualitas pelayanan bidang kesehatan	Angka Kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH	105
		Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH	8
		UHC	99,5
		Prevalensi Stunting (Pendek dan Sangat Pendek) Pada Balita	7
		Rasio Dokter terhadap jumlah penduduk	1 : 5.000
		Persentase Faskes dengan ketersediaan obat esensial	100

B. Strategi dan Kebijakan

Strategi yang dirumuskan dalam RPJMD adalah Peningkatan derajat kesehatan masyarakat dengan kebijakan :

- Meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan
- Meningkatkan serta peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan

C. Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Prioritas

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Non Urusan								
-								
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
penyusunan Dokumen perencanaan perangkat daerah	Dinas Kesehatan	jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat	14 dokumen	73.795.000	APBD		14 dokumen	248.332.000
Koordinasi dan penyusunan capaian kinerja dan ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Dinas Kesehatan	jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD dan laporan hasil koordinasi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	12 laporan	239.060.000	APBD		12 laporan	143.846.000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Kesehatan	jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	600 Orang/bln	112.996.604.342	APBD		600 Orang/bln	112.996.604.342
koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah dokumen koordinasi dan pelaksanaan akutansi SKPD	12 Dokumen	112.900.000	APBD		12 Dokumen	112.887.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Dinas Kesehatan	jumlah dokumen rekon dan laporan barang milik daerah	12 Dokumen	28.696.000	APBD		12 Dokumen	47.264.000
Administrasi Kepegawaian perangkat Daerah								
Koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	Dinas Kesehatan	jumlah Dokumen Hasil koordinasi dan pelaksanaan sistem informasi kepegawaian	12 dokumen	16.205.000	APBD		12 dokumen	41.710.000
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Kesehatan	jumlah Dokumen Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		248.720.000	APBD			782.241.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah								
penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Dinas Kesehatan	jumlah paket instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 paket	22.116.750	APBD		1 paket	16.067.250
penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Dinas Kesehatan	jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 paket	218.482.098	APBD		1 paket	185.468.943
penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Dinas Kesehatan	tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 paket	230.389.439	APBD		1 paket	202.799.870
penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Dinas Kesehatan	tersedianya bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12 bulan	28.486.370	APBD		12 bulan	11.800.000
penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Dinas Kesehatan	jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	12 laporan	968.101.000	APBD		12 laporan	1.114.798.080
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen	340.392.545	APBD		1 Dokumen	287.641.186
pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah								

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Kesehatan	tersedianya kendaraan dinas untuk kelancaran tugas operasional atau lapangan		0				
pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Dinas Kesehatan	tersedianya peralatan dan mesin lainnya	1 Paket	1.274.279.645	APBD		1	368.550.000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	APBD		1	142.784.997
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah Daerah								
penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Dinas Kesehatan	jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air, dan listrik yang disediakan	12 laporan	1.168.000.000	APBD		12 laporan	792.000.000
penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Dinas Kesehatan	jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 laporan	1.801.811.540	APBD		12 laporan	1.106.474.695
Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah								
penyediaan jasa pemeliharaan, biasanya pemeliharaan, pajak, dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Dinas Kesehatan	jumlah kendaraan perorangan Dinas atau kendaraan Dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 paket	1.515.880.000	APBD		1 paket	714.650.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
pemeliharaan/rehabilitasi sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya	Dinas Kesehatan	jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 paket	298.288.878	APBD		1 paket	68.090.000
pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Dinas Kesehatan	jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 paket	197.290.000	APBD		1 paket	142.784.997
Urusan								
Wajib								
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT								
Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota								
Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1: 1000	65%	22.926.192.000	APBD		65%	100.481.000
Pembangunan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Memenuhi Standar	65%	14.568.502.007	APBD		65%	1.272.950.498
Pengembangan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas yang Ditingkatkan Sarana, Prasarana, Alat Kesehatan dan SDM agar Sesuai Standar	18	1.150.000.000	APBD		96,00%	6.337.834.800

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Rumah Sakit (Unit)		500.000.000	APBD		18	1.265.000.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas (Unit)		2.735.046.000	APBD		90%	1.413.230.000
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah Sarana dan Prasarana dan Alat Kesehatan yang telah dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Fasilitas Kesehatan Lainnya (Unit)		6.190.264.000	APBD		60%	5.136.170.486
Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan Yang Disediakan (Unit)		8.715.654.895	APBD		90%	739.172.420
Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center (Unit)		194.841.000	APBD		80%	178.890.900
Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar (Unit)		230.032.000	APBD		0,40	82.800.000
Pengembangan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Rumah Sakit yang ditingkatkan sarana, prasarana, alat kesehatan dan SDM agar sesuai standar jenis pelayanan rumah sakit berdasarkan kelas rumah sakit yang memenuhi rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk minimal 1:1000 dan /atau dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan rumah sakit (Unit)		1.600.000.000	APBD		96%	388.486.377
Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan(Laporan)		9.433.396.942				8.719.244.198

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	RENCANA TAHUN 2024 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Dasar Melalui Pendekatan Keluarga	Dinas Kesehatan	Jumlah Keluarga yang Sudah Dikunjungi dan Diintervensi Masalah kesehatannya oleh Tenaga Kesehatan Puskesmas (Keluarga		1.449.104.705				48.263.000
Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman ke Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan ke Fasilitas Kesehatan (Paket)		413.094.000				105.245.074
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3350 orang	136.710.800	APBD		3350 orang	119.566.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Dinas Kesehatan	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3200 orang	124.339.400	APBD		3200 orang	51.983.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Dinas Kesehatan	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3150 orang	119.130.000	APBD		3150 orang	553.106.200
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Dinas Kesehatan	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18000 orang	75.256.800	APBD		18000 orang	23.418.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Dinas Kesehatan	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	16398 orang	423.703.000	APBD		16398 orang	66.035.00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	167922 orang	92.753.026	APBD		167922 orang	203.798.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Dinas Kesehatan	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	18500 orang	477.726.000	APBD		18500 orang	207.521.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	17230 orang	49.356.000	APBD		17230 orang	82.744.000

Rencana Kerja Tahun Anggaran 2025 Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Dinas Kesehatan	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3482 orang	47.331.000	APBD		3482 orang	71.515.000
--	-----------------	---	------------	------------	------	--	------------	------------

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar	462 orang	57.988.000	APBD		462 orang	54.443.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	3506 orang	94.833.208	APBD		3506 orang	64.413.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Dinas Kesehatan	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	6521 orang	53.543.000	APBD		6521 orang	40.100.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)	Dinas Kesehatan	Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) yang tertangani	100%	13.218.000	APBD		100%	10.912.000
Pengambilan dan pengiriman spesimen penyakit potensial KLB ke Laboratorium rujukan/nasional	Dinas Kesehatan	Jumlah sampel yang diambil dan diantar	100,0%	58.636.000	APBD		100,0%	64.499.600
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Dinas Kesehatan	Prevalensi wasting (kurus dan sangat kurus) pada balita	8,5%	71.756.800	APBD		8,5%	30.424.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Dinas Kesehatan	Persentase Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	95%	277.690.288	APBD		95%	120.132.175
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Dinas Kesehatan	Persentase sarana yang dilakukan IKL (TTU,TPM, Sarana Air Minum, Sarana Air Bersih	90%	213.295.000	APBD		90%	119.273.000
Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Tercapainya tatanan Rumah Tangga (Indeks Rumah Sehat) berPHBS	85 IRS	1.025.560.997	APBD		85 IRS	91.430.200

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya	Dinas Kesehatan	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki kelompok Asuhan Mandiri toga	80/ 131 61%	229.539.400	APBD		80/ 131 61%	150.257.500
Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Dinas Kesehatan	Kelengkapan dan ketepatan waktu SKDR Surveilans Kesehatan	95%	158.728.000	APBD		95%	79.444.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Dinas Kesehatan	Jumlah skrining kesehatan jiwa	6502 orang	28.530.000	APBD		6502 orang	81.888.000
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA	Dinas Kesehatan	Jumlah kegiatan skrining NAPZA	24 kl/ 100%	31.379.000	APBD		24 kl/ 100%	50.809.000
Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan	Dinas Kesehatan	Persentase penduduk terdampak krisis kesehatan yang memperoleh pelayanan kesehatan	100%	41.253.000	APBD		100%	128.143.400
Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Dinas Kesehatan	tidak adanya kasus kematian DBD	0%	96.085.000	APBD		0%	157.257.500
Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Peserta JKN KIS di Kabupaten Tabalong	99%	47.212.595.400	APBD		99%	44.170.773.900
Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional				27.918.000				
Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat	Dinas Kesehatan	Persentase 9 Tatanan KKS yang mencapai minimal 71% (Swastisaba Padapa)	100%	172.375.637	APBD		100%	137.752.000
Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit	12 Dokumen	0	APBD		12 Dokumen	56.031.252.786
Operasional Pelayanan Puskesmas	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	12 Dokumen	388.180.000	APBD		12 Dokumen	0
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Dinas Kesehatan	Tersedianya Darah Donor Layanan PMI di Kabupaten Tabalong	6000 kantong	1.671.611.000	APBD		6000 kantong	800.000.000

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota	45 unit	114.000.000	APBD		45 unit	102.470.000
Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)	Dinas Kesehatan	Persentase kasus kegawatdaruratan yang ditangani	70%	2.071.730.730	APBD		70%	71.479.000
Pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok	Dinas Kesehatan	Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok	7 tatanan	97.145.000	APBD		7 tatanan	75.731.000
Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak				172.480.000				
Pengelolaan Layanan Imunisasi	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi	4	33.136.000	APBD		4	45.784.00
Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								
Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Puskesmas Menjalankan RME	18 Puskesmas	122.712.000	APBD		18 Puskesmas	207.702.856
Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (NM) Pelayanan Kesehatan	60 Unit	596.520.821	APBD		60 Unit	375.493.000
Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Dinas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dipersiapkan untuk Pelayanan Kesehatan	1 Unit	146.358.000	APBD		1 Unit	706.415.600

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN								
Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota								
Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	100%	5.425.000	APBD		100%	6.183.000
Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota								
Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)		44.320.000				75.959.000
Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) (orang)		2.118.524.400				2.243.558.400
Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan (Dokumen)						
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya	86%	1.166.049.000	APBD		86%	266.693.900

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN								
Pemberian izin Apotek, Toko obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)								
Pengendalian dan Pengawasan serta Tidak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasn perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	100	94.967.800	APBD		100	24.672.360
Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi, untuk Produk Makanan Minuman tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga						
Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut Pengawasan sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produksi makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Dinas Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai izin Produksi, untuk Produk makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	100%	57.595.880	APBD		100%	95.218.618

PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI DETAIL	INDIKATOR	PAGU PERUBAHAN 2025 (N)			CATATAN PENTING	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 (N+1)	
			TARGET KINERJA	ANGGARAN	SUMBER DANA		TARGET KINERJA	ANGGARAN
Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga								
Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan	Dinas Kesehatan	Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan Minuman Industri Rumah Tangga Beredar Yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam Rangka Tindak Lanjut Pengawasan	80%	138.214.200	APBD		80%	94.875.000
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN								
Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota								
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat	Dinas Kesehatan	Jumlah Kegiatan Promosi Kesehatan (Aksi) yang dilakukan di Kabupaten Tabalong	180 kl	375.277.462	APBD		180 kl	562.937.608
Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Dinas Kesehatan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya(Orang)						
Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Dinas Kesehatan			72.490.000				

BAB IV

P E N U T U P

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2025 (RENJA) Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong menyajikan uraian Tentang Kinerja instansi Dinas Kesehatan dalam hal Perencanaannya.

Kami menyadari sepenuhnya bahwa Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Tahun 2025 ini jauh dari sempurna oleh karena itu kami membutuhkan koordinasi, sinkronisasi dan kerja sama yang optimal dari berbagai pihak untuk mendukung perbaikan penyusunan ditahun-tahun mendatang.

Tanjung, Agustus 2025
Plt. Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten Tabalong



Dr. Husin Ansari, SE, ME

Pembina TK I / IV/b

NIP. 19720418 199303 1 006

